



Laporan Percepatan Pembangunan Papua

PERIODE SEPTEMBER 2025

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat Daya



Kegiatan-Kegiatan Strategis





PAPUA CERDAS (1)



Selama bulan Agustus 2025, Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pada sektor kesehatan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya misi Papua Sehat. Highlight kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- ❖ Sosialisasi Penyakit Stroke Bagi Nakes di Fasyankes Kabupaten Tambrau (01–03 Agustus 2025, Gedung Pertemuan Kantor Bappeda Kabupaten Tambrau): Pokja Sehat hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi penanganan penyakit stroke bagi tenaga kesehatan. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman lebih baik mengenai urgensi pencegahan stroke sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup dan menekan beban sosial.
- ❖ Pertemuan dengan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau (02 Agustus 2025, Kabupaten Tambrau): Pokja Sehat melaksanakan koordinasi terkait optimalisasi pelayanan Puskesmas Mega. Hasil kegiatan berupa rencana pertemuan lintas kabupaten (Tambrau–Sorong) untuk membahas status aset Puskesmas.
- ❖ Monev RSUD Scholoo Keyen-Misi Papua Sehat (05 Agustus 2025, RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan): Pokja Sehat melakukan evaluasi pengembangan layanan RSUD. Bupati Sorong Selatan dan Direktur RSUD berkomitmen meningkatkan kualitas layanan sesuai arah kebijakan nasional dan daerah.
- ❖ Pembentukan Tim Terpadu Keliling Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tambrau (12 Agustus 2025, Aula RS Pratama Fef): Pokja Sehat melaksanakan sinkronisasi program perlindungan perempuan dan anak serta memberikan materi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan. Hasilnya, terbentuk Tim Terpadu Keliling Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tambrau.



PAPUA CERDAS (2)



- ❑ Audiensi dengan Tim Sekolah Sepanjang Hari (SSH) Kabupaten Maybrat (22 September 2025) Pertemuan ini membahas capaian, tantangan, dan strategi pengembangan Program SSH di Kabupaten Maybrat. Disepakati bahwa SSH merupakan model pendidikan kontekstual yang efektif dalam membentuk generasi Papua yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Ditetapkan pula langkah-langkah strategis seperti pembentukan Tim Koordinasi Teknis SSH-MBG, pelatihan guru, serta penyusunan laporan tematik SSH Maybrat 2025 sebagai praktik baik pendidikan kontekstual di Tanah Papua.
- ❑ Monitoring dan Evaluasi Sekolah YPK di Kota Sorong (26 September 2025) Evaluasi dilakukan di SD YPK Elim Malanu dan SMP YPK Shaloom Klademak III. Hasil uji petik menunjukkan bahwa YPK belum menjalankan peran kelembagaan secara optimal, sementara seluruh operasional ditangani pemerintah daerah. Pokja Cerdas merekomendasikan pelaksanaan Forum SHEK bersama PSW YPK Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan menyusun langkah perbaikan tata kelola yayasan.
- ❑ Monitoring dan Evaluasi Sekolah YPK di Pulau Soop, Distrik Sorong Kepulauan (27 September 2025) Pokja Papua Cerdas menemukan bahwa berbagai permasalahan, seperti kepemilikan tanah, pembayaran honor guru kontrak, hingga pembangunan ruang belajar, ditangani langsung oleh sekolah dan pemerintah tanpa dukungan yayasan. Disepakati perlunya penguatan kelembagaan dan sinergi antaraktor pendidikan. Tindak lanjut direncanakan melalui Forum SHEK bersama Persekutuan Sekolah YPK di Provinsi Papua Barat Daya.



Kegiatan Pokja Papua Cerdas selama bulan September 2025 menegaskan peran strategis BP3OKP dalam mendorong tata kelola pendidikan yang transparan, terarah, dan partisipatif. Melalui koordinasi lintas sektor dan forum SHEK, diharapkan terjadi: Penguatan peran yayasan dalam mendukung mutu pendidikan; Integrasi program SSH-MBG untuk peningkatan kualitas gizi dan karakter siswa, serta; Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari implementasi misi Papua Cerdas dalam kerangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya.



PAPUA PRODUKTIF

Selama bulan September 2025, Pokja Papua Produktif BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Highlight kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Bursa Kerja (Job Fair) Papua Barat Daya 2025

(16–17 September 2025, BPVP Sorong)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut undangan Pemerintah Daerah sekaligus bagian dari pelaksanaan fungsi SHEK di bidang ketenagakerjaan. Job Fair dihadiri oleh 17 perusahaan yang membuka 1.062 lowongan kerja, dan menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan tingginya angka pengangguran terbuka (6,61%) di Papua Barat Daya.

Melalui kegiatan ini, semangat Otonomi Khusus ditegaskan dengan prioritas rekrutmen bagi Orang Asli Papua (OAP) serta komitmen pembinaan dan pelatihan berkelanjutan. Pokja Papua Produktif menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan dalam membangun SDM Papua Barat Daya yang kompeten dan berdaya saing.

Selain itu, kegiatan ini menegaskan pentingnya program pelatihan vokasi, penyediaan peralatan usaha, serta pelaksanaan Job Fair secara berkala untuk memperkuat Papua Produktif yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.



KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA



Pendampingan Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada kegiatan Sosialisasi Program Sekolah Sepanjang Hari dan Makan Bergizi Gratis



Workshop Bioekonomi Restoratif Tanah Papua - Econusa



Audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan



Audiensi dengan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya



Audiensi bersama Wakil Presiden Republik Indonesia (Rapat Pleno BPP)

KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA



Press Conference Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya



Workshop Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) untuk Akselerasi Layanan Dasar Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya



SHEK terkait Status Tanah Bekas Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong



Pertemuan dengan Kepala Subdit Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Kementerian Keuangan (Bapak Ardimansyah)



Pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat



Audiensi dengan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya

Selama bulan September 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melalui berbagai kegiatan strategis bersama lintas bidang dan lintas lembaga telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna memperkuat pelaksanaan empat misi utama pembangunan Papua: Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai. Kegiatan strategis ini menjadi wadah penguatan sinergi antara BP3OKP dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, lembaga negara, serta mitra pembangunan lainnya untuk memastikan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Highlight kegiatan strategis bersama selama bulan September 2025 antara lain:

- ❖ Sosialisasi Program Sekolah Sepanjang Hari dan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Maybrat : Kegiatan ini berfokus pada integrasi program pendidikan dan gizi anak sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua Barat Daya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya kesepahaman antarinstansi untuk memperluas cakupan program dan memperkuat dukungan lintas sektor pendidikan dan kesehatan.
- ❖ Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan : Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam sinkronisasi program pembangunan daerah sesuai misi Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan sejumlah kebutuhan teknis dan komitmen mendukung program prioritas BP3OKP di wilayahnya.
- ❖ Workshop Bioekonomi Restoratif Tanah Papua (Econusa) : Pokja Produktif bersama mitra pembangunan berdiskusi mengenai penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Kegiatan ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dan kolaborasi multi pihak dalam pengembangan ekonomi restoratif yang ramah lingkungan.
- ❖ Audiensi dengan Wakil Gubernur Papua Barat Daya : Pertemuan ini membahas koordinasi pelaksanaan program strategis nasional di Papua Barat Daya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Gubernur menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD dan percepatan pembentukan Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota.
- ❖ Audiensi dengan DPRD Papua Barat Daya : Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi antara BP3OKP dan legislatif dalam memperkuat peran pengawasan terhadap tata kelola Dana Otsus serta memastikan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
- ❖ Audiensi bersama Wakil Presiden Republik Indonesia : Dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara Sorong, pertemuan ini memperkuat arah kebijakan pembangunan Otonomi Khusus di Papua. Wapres menegaskan pentingnya fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan stunting, pemberantasan korupsi, serta sinkronisasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).

- ❖ Press Conference Anggota BPP Papua Barat Daya : Kegiatan ini menjadi wadah publikasi kinerja BP3OKP serta penyampaian informasi capaian pelaksanaan misi Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai kepada masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga.
- ❖ Pertemuan dengan Kementerian Keuangan RI (Subdit DID, Otsus, dan Dana Keistimewaan) : Pertemuan ini membahas percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 serta asistensi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Otsus. Hasilnya, disepakati mekanisme pendampingan *On The Job Training* untuk memastikan penyusunan RAP Otsus berjalan efektif.
- ❖ Workshop Penulisan *Policy Brief* (Papua Barat dan Papua Barat Daya) : Kegiatan ini meningkatkan kapasitas anggota Pokja dan analisis kebijakan dalam penyusunan policy brief berbasis data. Hasilnya, terbentuk jejaring *Community of Practice (CoPI)* antarprovinsi yang menjadi forum berbagi praktik baik dan advokasi kebijakan berbasis bukti.
- ❖ Pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat : Pokja BP3OKP melaksanakan koordinasi penguatan tata kelola pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi di wilayah Papua Barat Daya. Pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi dalam pemantauan implementasi kebijakan publik di daerah.
- ❖ Koordinasi Status Tanah Bekas Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong : BP3OKP berkoordinasi dengan Kantor ATR/BPN untuk menindaklanjuti penyelesaian status tanah aset pemerintah yang belum bersertifikat. Hasilnya, disepakati tindak lanjut berupa pelaksanaan Forum SHEK dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan strategis bersama selama bulan September 2025 menunjukkan peran BP3OKP Papua Barat Daya sebagai penggerak sinergi lintas sektor dalam pembangunan Papua. Melalui kegiatan ini, empat misi utama — Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai — dioperasionalkan secara terintegrasi, menghasilkan komitmen bersama untuk:

- Mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Otsus,
- Memperkuat kapasitas kelembagaan daerah,
- Mendorong pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan, dan
- Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan sosial.

Capaian ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan agenda pembangunan triwulan berikutnya dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai.

Capaian & Rekomendasi



CAPAIAN

Selama bulan September 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan 28 kegiatan koordinatif, sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi (SHEK) di berbagai bidang yang berlandaskan empat misi utama Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Secara umum, capaian pelaksanaan tugas dan fungsi bulan ini menunjukkan:

1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pusat–Daerah

- a) Terjalin koordinasi yang efektif antara BPP di daerah dengan Sekretariat BPP Pusat, Kanwil DJPb, dan Kementerian/Lembaga terkait.
- b) Audiensi bersama Wakil Presiden RI memperkuat arah kelembagaan BP3OKP, khususnya dalam percepatan pengesahan RAPPP 2025–2029 dan penetapan Sekretaris Eksekutif.
- c) BPP Papua Barat Daya aktif menjadi narasumber dan tim penguji dalam kegiatan nasional seperti Evaluasi RPL Bappenas, memperkuat posisi strategis lembaga dalam pembangunan berbasis kompetensi di Tanah Papua.

2. Konsolidasi Program Prioritas dan Layanan Dasar

- a) Pelaksanaan berbagai kegiatan Papua Cerdas dan Sehat seperti uji petik peran YPK, koordinasi program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta workshop penyusunan policy brief memperkuat pendekatan pembangunan berbasis bukti (evidence-based).
- b) Hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan peran yayasan pendidikan serta sinkronisasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak dan penurunan stunting.

3. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Otsus

- a) BPP Papua Barat Daya bersama Kanwil DJPb Papua Barat mengembangkan alat ukur evaluasi kinerja Otonomi Khusus serta menyelaraskan format evaluasi laporan Otsus antarprovinsi (BPP).
- b) Dilakukan koordinasi dengan DPRP, MRP, dan Pemda untuk memastikan dana Otsus dan TKD terserap optimal dan tidak kembali menjadi SILPA tinggi.
- c) Muncul inisiatif pembentukan Community of Practice (CoPI) untuk memperkuat kapasitas analisis kebijakan di daerah.

4. Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Daerah dan Aset Pemerintah

- a) Melalui forum SHEK dan koordinasi lintas instansi, BPP berperan aktif dalam mempercepat penyelesaian masalah aset pemerintah (seperti status tanah bekas Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong dan aset Pemkot Sorong).
- b) Didorong pembentukan forum terpadu lintas kementerian (ATR/BPN, DLHKP, Pemda) guna menjamin kepastian hukum aset daerah dan mendukung rencana investasi.

5. Penguatan Sinergi Sosial–Politik dan Ekonomi Daerah

- a) Kegiatan bersama DPRD, BIN, dan Ombudsman memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan publik, serta komunikasi kebijakan yang lebih inklusif.
- b) Pelaksanaan Job Fair Papua Barat Daya 2025 menjadi langkah konkret penguatan ekonomi produktif dan penyerapan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP).

6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Inovasi Kebijakan

- a) Melalui Workshop Policy Brief dan Rapat Teknis Evaluasi Otsus, anggota Pokja dan analis kebijakan memperoleh peningkatan kapasitas dalam analisis data, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan komunikasi publik yang efektif.
- b) Hasil pelatihan diharapkan menghasilkan produk kebijakan tematik berbasis data di bidang kemiskinan, stunting, dan ekonomi biru.



REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi umum berdasarkan rekapitulasi kegiatan dan capaian antara lain :

1. **Optimalisasi Penyerapan dan Akuntabilitas Dana Otsus** : Melanjutkan koordinasi lintas lembaga (BP3OKP, DJPb, MRP, DPRP, dan Pemda) untuk memperkuat sistem monitoring penggunaan dana Otsus dan mencegah peningkatan SILPA; Mengembangkan dashboard evaluasi Otsus berbasis data digital untuk pelacakan capaian output dan outcome per kabupaten/kota;
2. **Sinkronisasi Program Layanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat** : Menyusun rencana aksi terpadu Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggabungkan aspek pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan lokal; Melakukan pendampingan teknis kepada OPD pendidikan dan kesehatan di daerah untuk memastikan keberlanjutan program prioritas.
3. **Penyelesaian Isu Aset dan Penguatan Investasi Daerah** : Membentuk Forum SHEK Aset Daerah yang melibatkan ATR/BPN, DLHKP, dan Pemda untuk menyelesaikan permasalahan aset pemerintah secara terpadu; Menetapkan mekanisme pelaporan dan penilaian aset untuk mendukung perencanaan investasi dan pengembangan ekonomi daerah.
4. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengembangan Kebijakan Berbasis Data** : Mengintegrasikan pelatihan *Policy Brief* ke dalam rencana kerja Pokja, agar setiap kegiatan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif; Mendorong pembentukan *Community of Practice (CoPI)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah kolaborasi analisis kebijakan daerah.
5. **Penguatan Kolaborasi Multi Pihak dan Komunikasi Publik** : Mengembangkan mekanisme koordinasi rutin antara BP3OKP dengan DPRD, Ombudsman, dan lembaga vertikal lainnya dalam pengawasan dan transparansi kebijakan publik; Memperluas publikasi capaian program BP3OKP melalui media lokal dan forum komunikasi masyarakat untuk memperkuat kepercayaan publik dan partisipasi warga.



Penutup

Demikian penyampaian **Laporan Percepatan Pembangunan Papua**
Periode Bulan **September 2025** **Badan Pengarah Percepatan**
Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua
Barat Daya.



Sorong, 16 Oktober 2025

Nomor : 7/SPrm/BPP-PBD/SOQ/X/2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua &
Laporan Bulanan Operasional dan Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
Periode Bulan September Tahun 2025

Kepada Yth.

1. Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) Jayapura
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) Manokwari
- Di -

Tempat

Dengan Hormat,


Menindaklanjuti surat Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura nomor S-3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Pedoman Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua, serta sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) yang telah dilakukan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Kami bermaksud untuk melaporkan beberapa laporan, antara lain :

1. Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya Periode Bulan September 2025.
2. Laporan Operasional dan Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya Periode Bulan September 2025.

Laporan-laporan tersebut dapat diakses pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1iBBkloI22eiX7eORvAWIetf7kilPb824?usp=drive_link

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,

DRS. OTTO IHALAUW, MA



Tembusan Yth :

1. KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua
Daya



Laporan Bulanan

Badan Pengarah Papua

SEPTEMBER 2025

Laporan Operasional & Kegiatan

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Provinsi Papua Ba



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga, penyusunan Laporan Bulanan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dapat diselesaikan dengan baik.

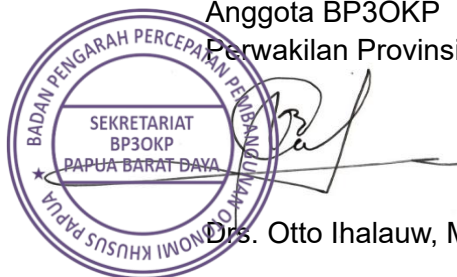
Laporan ini merupakan laporan operasional dan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan September 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan, realisasi dan kinerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sorong, 10 Oktober 2025

Anggota BP3OKP

Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,



Drs. Otto Ihatau, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Maksud & Tujuan	4
1.2 Ringkasan Kelembagaan	4
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	4
1.2.2 Definisi	5
1.2.3 Struktur Kelembagaan.....	5
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	5
1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	6
1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	7
BAB II KEGIATAN DAN CAPAIAN	8
2.1 Rekapitulasi Kegiatan	8
2.2 Capaian	62
BAB III PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud & Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai laporan rutin yang dilaporkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP), Kepala Sekretariat BPP Provinsi Jayapura (selaku koordinator Sekretariat BPP), serta Kepala Sekretariat BPP Sorong (KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya).

Tujuan dari disusunnya laporan ini antara lain :

- 1) Sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan September 2025.
- 2) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya pada bulan September 2025.
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan/ atau program kerja, penyelenggaraan dan evaluasi kerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya untuk bulan yang akan datang.
- 4) Sebagai laporan operasional Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

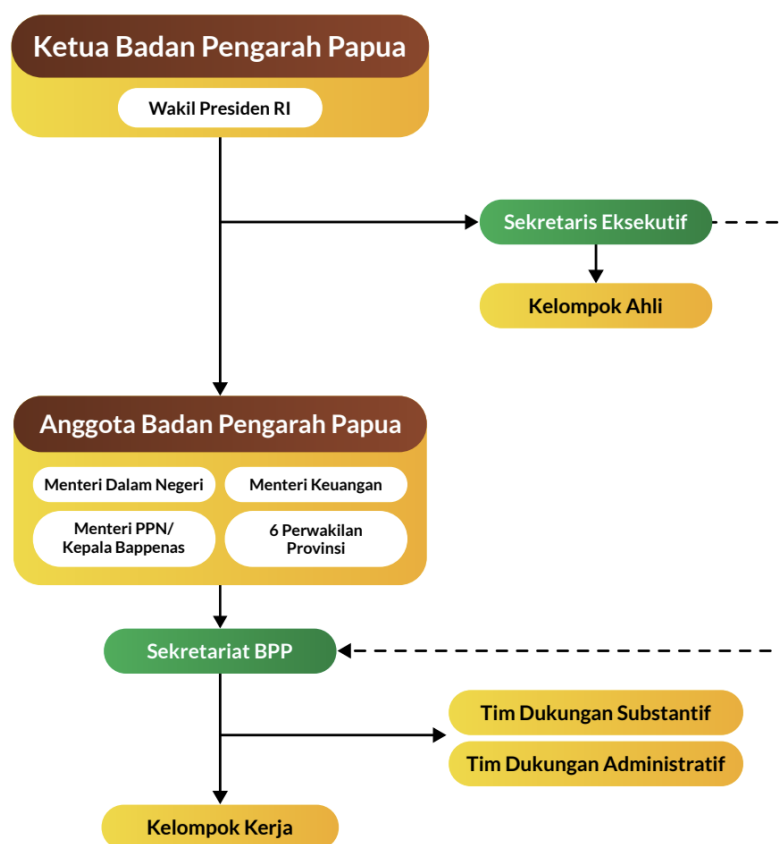
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 3) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
- Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

Ringkasan jumlah sumber daya manusia yang ada di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya antara lain :

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1	Pimpinan (Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya)	1
2	Kelompok Kerja	
	Papua Sehat	1
	Papua Cerdas	1
	Papua Produktif	1
	Papua Polhukam/Damai	1 (Nonaktif)
	Usulan Pokja yang Aktif Terlibat	2
3	KPPN Sorong sebagai Tim Dukungan Administratif	5
4	Staf PPNPN	3
Jumlah		13

1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

No	Uraian	Jumlah (Unit/Set) / Keterangan
A	Bangunan	1 Unit (Milik GKN Sorong)
B	Ruangan	
	Front Office	1 Unit
	Ruang Rapat	1 Unit
	Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Istirahat Pimpinan/ Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Dapur	1 Unit
	Ruang Kamar Mandi/Toilet	2 Unit
C	Peralatan dan Perlengkapan	
	Meja Kerja	10 Unit
	Kursi Kerja	10 Unit
	Meja Rapat	1 Unit
	Kursi Rapat	9 Unit
	Meja Tamu	1 Unit
	Kursi Tamu	3 Unit
	AC	5 Unit
	Printer	2 Unit
	Laptop	7 Unit
	Sofa Tamu	1 Set
	Smart TV	3 Unit
	Meja dan Kursi Makan	1 Set
	Kulkas	1 Unit
	Kompor Listrik	1 Unit
	Dispenser	2 Unit
	Mesin Kopi	1 Unit
	Jam Dinding	3 Unit
	Kitchen Set	1 Set
	CCTV	4 Unit
	Lemari Arsip	1 Unit
	Lemari Kamar	1 Unit
	Tempat Tidur	1 Unit
	Rak Piring Kecil	2 Unit
	Starlink	1 Unit
	Hardisk	2 Unit
	ATK (Stapler, Gunting, Penggaris, dll)	Tersedia
	Peralatan Makan (Piring, Sendok, dll)	Tersedia

BAB II

KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan September tahun 2025, antara lain :

1) Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	01-02 September 2025 di Kabupaten Sorong Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan Uji Petik Peran dan Tata Kelola YPK di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Pihak Sekolah SD YPK Mubarak Sodrofoyo, SMA YPK Teminabuan, SD YPK Markus Teminabuan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Cerdas)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil uji petik terhadap aspek 1–3, diperoleh hasil negatif, yang berarti seluruh jawaban menunjukkan bahwa Yayasan tidak berperan. 2. Dari pertanyaan terbuka yang diajukan, diperoleh keterangan bahwa peran Yayasan sangat kurang bahkan tidak ada, karena seluruh urusan layanan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui OPD teknis. 3. Laporan secara detail berupa hasil analisis lengkap akan disampaikan secara terpisah, namun tetap menjadi satu kesatuan dengan laporan kegiatan ini.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Hasil Uji Petik ini akan didiskusikan bersama Pusat Studi Wilayah (PSW) baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi, guna memperoleh masukan dan langkah perbaikan lebih lanjut.


Dokumentasi



2) Kegiatan 2

Nama Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Kabupaten Raja Ampat

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	03-04 September 2025 di Kabupaten Raja Ampat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan Uji Petik Peran dan Tata Kelola YPK di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Pihak Sekolah SD YPK Alfa Omega Waisai, SMK YPK Bukit Zaitun, SMP YPK Alfa Omega Waisai
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Cerdas)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil uji petik terhadap aspek 1–3, diperoleh hasil negatif (semua jawaban TIDAK), yang menunjukkan bahwa Yayasan tidak berperan baik dalam aspek manajemen guru, tata kelola tanggung jawab yayasan, maupun aspek layanan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang dikunjungi. 2. Jawaban atas pertanyaan terbuka juga menunjukkan bahwa peran Yayasan sangat kurang bahkan tidak ada, karena seluruh urusan layanan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui OPD teknis. 3. Laporan secara detail berupa hasil analisis lengkap akan disampaikan secara terpisah, namun tetap menjadi satu kesatuan dengan laporan kegiatan ini.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Rencana tindak lanjut selanjutnya adalah pelaksanaan Forum SHEK bersama PSW Provinsi Papua Barat Daya.
Dokumentasi	



3) Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Pendampingan Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada kegiatan Sosialisasi Program Sekolah Sepanjang Hari dan Makan Bergizi Gratis
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	03-04 September 2025 di Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Menumbuhkan kesamaan persepsi dan komitmen lintas sektor terhadap implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan anak usia sekolah di wilayah Papua Barat Daya.</p> <p>Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Daerah bersama BP3OKP Papua Barat Daya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta mitra perguruan tinggi (UNIPA) melakukan langkah awal untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelaraskan pemahaman antar pemangku kepentingan; 2. Mengidentifikasi kesiapan daerah dan sekolah; 3. Menyusun rencana aksi pelaksanaan SSH dan MBG di kabupaten/kota lokus prioritas (antara lain Maybrat, Tambrau, dan Sorong Selatan).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kab Maybrat; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Maybrat; Tamu undangan lainnya

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Cerdas & Produktif)
Hasil Kegiatan	OPD teknis, sekolah, dan masyarakat telah memahami konsep serta tanggung jawab masing-masing dalam implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari yang diintegrasikan dengan Makan Bergizi Gratis. Pemahaman ini menjadi modal dasar dalam penyusunan perencanaan dan keterlibatan para pihak pada pelaksanaan program dimaksud.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu disusun dokumen rencana kerja tahunan yang memuat lokasi, target siswa, kebutuhan sarana, serta jadwal pelaksanaan program. 2. Sekolah-sekolah di kabupaten/kota yang siap melaksanakan SSH dan MBG, antara lain SD YPK Silo Kambuaya dan SD YPK Ayata di Kabupaten Maybrat. 3. Tim lintas dinas dan pemangku kepentingan perlu melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. 4. Diperlukan baseline data mengenai kebutuhan bahan pangan, tenaga dapur, serta sumber bahan lokal (seperti sagu, telur, sayuran, dan ikan).
Dokumentasi	



4) Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Workshop Bioekonomi Restoratif Tanah Papua - Econusa
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	03-04 September 2025 di Vega Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Mematahkan peluang ekonomi restoratif yang tidak merusak hutan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat adat (OAP) untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui program ekonomi berbasis alam/hutan. Upaya ini dilaksanakan dengan dukungan pemerintah, NGO, dan masyarakat, melalui regulasi yang berpihak pada masyarakat adat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Usulan Pokja Produktif); Econusa; Pemda Provinsi Papua Barat Daya; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Produktif & Polhukam/Damai)

<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>Ekonomi Restoratif sebagai Alternatif Ekonomi Ekstraktif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi restoratif terbukti mampu menyerap tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) lebih banyak dibanding ekonomi ekstraktif. • Jika mendapat dukungan pemerintah daerah, dalam 20 tahun ke depan ekonomi restoratif diproyeksikan dapat melampaui ekonomi ekstraktif. <p>Peran Masyarakat Adat sebagai Subjek Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan lokal masyarakat adat merupakan fondasi penting dalam pengelolaan bioekonomi. • Keterlibatan masyarakat adat perlu diwujudkan melalui mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC), penguatan lembaga adat, dan regulasi khusus (Perdasus). <p>Kolaborasi Multi Pihak (Pentahelix)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah, swasta, masyarakat adat, akademisi, serta NGO/CSO perlu berkolaborasi untuk mendorong bioekonomi yang berkelanjutan. • Kunci keberhasilan terletak pada sinergi lintas sektor dalam riset, pendampingan, akses pasar, dan kebijakan publik. <p>Tantangan Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan SDM lokal, lemahnya kelembagaan adat, kebijakan yang tumpang tindih (Otsus vs Cipta Kerja), serta ketidakjelasan mekanisme pendanaan. • Ancaman deforestasi, degradasi keanekaragaman hayati, dan dampak perubahan iklim. <p>Peluang yang Dapat Dimaksimalkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi komoditas unggulan seperti kakao Ransiki, pala, sagu, ikan, rumput laut, dan udang.
-----------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan wilayah adat dan pengembangan agroforestri sebagai basis bioekonomi. • Sumber pendanaan alternatif melalui dana karbon, hibah internasional, CSR, dan diversifikasi pajak lingkungan. <p>Rencana Jangka Menengah (5 Tahun)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan 20 ribu wilayah adat dan 25 ribu perhutanan sosial tiap tahun. • Diversifikasi komoditas dan penguatan pasar berbasis teknologi. • Pembentukan regulasi perlindungan masyarakat adat serta investasi yang berpihak. • Pendanaan berkelanjutan melalui hibah luar negeri, APBD/APBN, dan forum CSR lintas sektor.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<p>Penguatan Masyarakat Adat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan & Pengakuan Wilayah Adat: percepatan pemetaan 20 ribu wilayah adat per tahun dan penetapan perhutanan sosial. • Penguatan Kelembagaan Adat: pembentukan forum adat dan penguatan kapasitas MRP/DPR Otsus agar efektif mengawal investasi. • Pendidikan & Pelatihan Pemuda/Pemudi OAP: program kaderisasi pengelola sumber daya (dokter kakao, wirausaha perikanan, agroforestri). <p>Kebijakan & Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perdasus Investasi Restoratif berbasis Free, Prior and Informed Consent (FPIC). • Audit regulasi untuk menyelaraskan UU Otsus dan UU Cipta Kerja. • Penyusunan RTRW dan RPJMD yang menempatkan bioekonomi sebagai prioritas pembangunan daerah. <p>Pengembangan Ekonomi Restoratif</p>

- Diversifikasi komoditas unggulan seperti kakao Ransiki, pala, sagu, ikan cakalang, rumput laut, dan udang.
- Pengembangan agroforestri dan ekonomi biru untuk mendorong budidaya berkelanjutan dengan nilai tambah produk turunan.
- Penguatan pasar melalui digitalisasi pemasaran, branding produk lokal, dan sertifikasi standar mutu internasional.

Pendanaan & Investasi

- Optimalisasi dana Otsus (block grant 1%) untuk mendukung ekonomi restoratif.
- Pembentukan forum CSR lintas sektor untuk mendukung usaha masyarakat adat.
- Akses pendanaan alternatif seperti dana karbon, pajak keanekaragaman hayati, hibah internasional, serta pajak progresif (windfall, karbon, super kaya).

Kolaborasi Pentahelix

- Pemerintah: memastikan kebijakan berpihak pada masyarakat adat serta integrasi program bioekonomi dalam RPJMD dan Renstra OPD.
- Masyarakat Adat: memperkuat pemetaan, koperasi adat, dan partisipasi dalam musrenbang Otsus.
- Swasta/Usaha Lokal: menjadi offtaker komoditas, mendukung akses modal, serta ikut dalam branding produk Papua.
- Akademisi: melaksanakan riset inovatif, sekolah lapangan, kampung binaan, dan teknologi adaptif.
- NGO/CSO: melakukan advokasi kebijakan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pasar dan akses ke pusat.

Monitoring & Evaluasi

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan mekanisme pemantauan ekonomi restoratif berbasis indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan. • Publikasi laporan tahunan tentang capaian pemetaan, penguatan kapasitas, dan perkembangan komoditas unggulan.
Dokumentasi	

5) Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Rapat Internal BPP Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	08 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Membangun sinkronisasi antara kebijakan pembangunan dan stabilitas politik–keamanan di Tanah Papua, terutama yang berkaitan dengan pembangunan Papua Damai.</p> <p>Rapat ini juga bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) melalui BP3OKP agar dapat berjalan secara efektif, aman, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Barat Daya.</p>
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota, Pokja, PPNPN)

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP
Hasil Kegiatan	<p>Kolaborasi strategis antara Kemenko Polhukam dan BP3OKP Papua Barat Daya telah menghasilkan sejumlah capaian penting, baik pada tingkat kelembagaan, koordinasi kebijakan, maupun dampak lapangan. Capaian ini memperkuat posisi Papua Barat Daya sebagai wilayah model pembangunan yang menyeimbangkan keamanan dan kesejahteraan melalui pendekatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Pendekatan Sosial–Kultural <ol style="list-style-type: none"> a. Kemenko Polhukam dan BP3OKP perlu mengadopsi pendekatan pembangunan yang humanis dan berbasis kearifan lokal, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Forum dialog dengan tokoh adat, tokoh gereja, dan komunitas perempuan; • Pemanfaatan struktur adat untuk mencegah konflik serta memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan. b. Papua Damai dijadikan sebagai pendekatan kebijakan lintas sektor, meliputi pembangunan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan sosial. 2. Pengarusutamaan Pembangunan Inklusif dan Keamanan Humanis <p>Seluruh program BP3OKP Papua Barat Daya diarahkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan masyarakat asli Papua sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat utama; • Didukung oleh sistem keamanan yang dialogis, bukan represif; • Menumbuhkan rasa saling percaya (trust-building) antara masyarakat dan negara. 3. Penguatan Sinergi Program Nasional dan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelarasan dilakukan antara Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–

	<p>2041 dengan RPJPD Papua Barat Daya 2025–2045 dan RPJMD kabupaten/kota.</p> <p>b. Program strategis seperti Sekolah Sepanjang Hari, Makan Bergizi Gratis, dan Papua Produktif dijalankan dengan dukungan keamanan wilayah, logistik, dan pengawasan sosial yang memadai.</p> <p>4. Membangun Model Replikasi “Papua Damai dan Produktif”</p> <p>a. Menjadikan Papua Barat Daya sebagai wilayah percontohan nasional untuk model integrated development and security governance, di mana pembangunan sosial-ekonomi dan stabilitas politik saling memperkuat.</p> <p>b. Setelah terbukti stabil, model ini dapat direplikasi ke provinsi lain di Tanah Papua (Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan).</p>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<p>1. Pembentukan Forum Koordinasi Pembangunan dan Keamanan Papua Barat Daya (FORKAP–PBD)</p> <p>a. BP3OKP bersama Kemenko Polhukam perlu memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan dan stabilitas wilayah melalui pembentukan FORKAP–PBD.</p> <p>b. Forum ini beranggotakan unsur Kemenko Polhukam, BP3OKP Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi, Polda, dan Kodam XVIII/Kasuari, serta dapat melibatkan instansi lain sesuai kebutuhan isu strategis.</p> <p>c. FORKAP–PBD berfungsi sebagai wadah koordinatif lintas lembaga untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatukan arah kebijakan pembangunan dan keamanan; • Mengantisipasi potensi gangguan sosial–politik; • Melakukan deteksi dini terhadap kerawanan daerah yang dapat menghambat percepatan pembangunan Otsus Papua. <p>2. Penguatan Kapasitas Aparatur dan SDM Lokal</p>

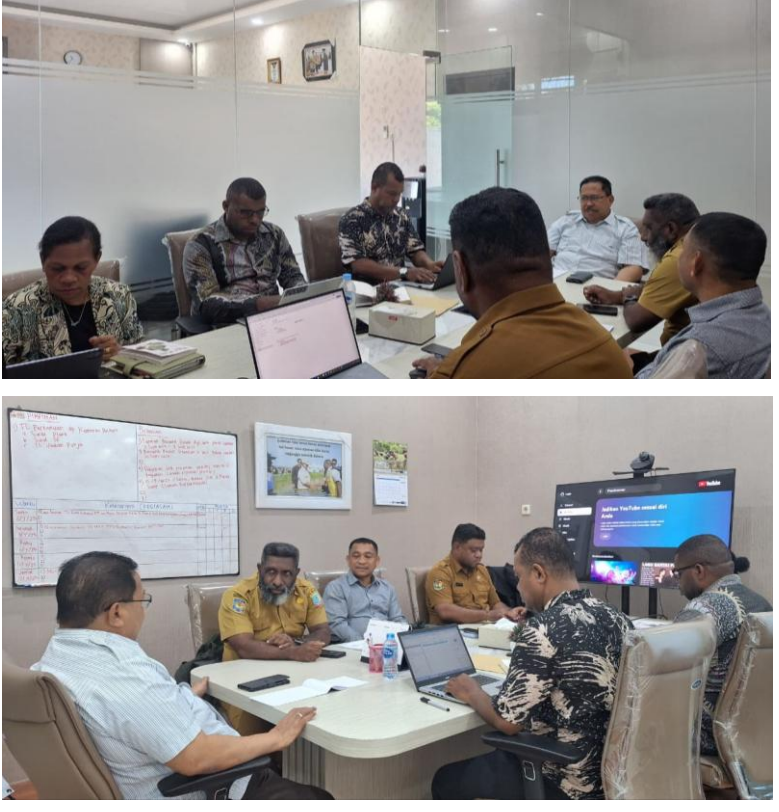
	<p>a. Kolaborasi antara Kemenko Polhukam dan BP3OKP diarahkan untuk memperkuat kapasitas SDM pemerintah daerah melalui pelatihan terpadu dengan modul seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Governance & Security for Development; • Manajemen Konflik Sosial; • Public Communication in Sensitive Areas. <p>b. Program ini bertujuan menumbuhkan kepemimpinan lokal Papua (local leadership) yang memahami keseimbangan antara pembangunan dan keamanan, serta mendorong profesionalisme aparatur.</p> <p>3. Pendekatan Sosial–Kultural dan Dialog Damai</p> <p>a. Keberhasilan pembangunan di Papua Barat Daya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan lembaga negara dalam membangun kepercayaan (trust) dengan masyarakat.</p> <p>b. Pendekatan sosial–kultural dan dialog damai perlu dijadikan fondasi utama dari setiap kebijakan pembangunan, melalui langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lokal; • Penggunaan mekanisme musyawarah adat seperti Musyawarah Noken; • Peningkatan partisipasi kelompok perempuan dan pemuda. <p>Melalui pendekatan ini, negara hadir secara humanis, menghargai budaya lokal, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan Papua Damai dan Papua Produktif.</p>
--	---



6) Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	09 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyamakan persepsi antarinstansi terhadap status kawasan hutan dan lahan yang direncanakan untuk pengembangan Bandara Inanwatan. 2. Mengidentifikasi aspek hukum dan teknis yang perlu dipenuhi dalam penggunaan lahan yang berstatus kawasan lindung. 3. Menyusun langkah koordinatif dan administratif untuk penyesuaian kawasan melalui mekanisme revisi tata ruang (RTRWP dan RTRWK) atau izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). 4. Menetapkan langkah mitigasi lingkungan guna mengurangi potensi dampak ekologis dari kegiatan pembangunan bandara. 5. Memastikan keterpaduan rencana pembangunan bandara dengan kebijakan pengelolaan lingkungan dan tata ruang Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); DLHKP PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Produktif & Polhukam/Damai)

<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi kesepakatan antarinstansi untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi spasial antara batas lahan bandara dengan peta kawasan lindung resmi dari Kementerian LHK. 2. DLHKP Provinsi Papua Barat Daya akan menyiapkan peta overlay kawasan lindung dan area Bandara Inanwatan sebagai dasar analisis hukum dan teknis penerbitan sertifikat. 3. BP3OKP Papua Barat Daya akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK guna memperoleh arahan formal terkait prosedur sertifikasi lahan negara pada kawasan hutan/lindung. 4. Dinas Perhubungan Provinsi akan melengkapi dokumen administrasi dan legalitas aset bandara, termasuk izin penggunaan lahan, dokumen AMDAL revisi, serta bukti kepemilikan aset pemerintah. 5. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan akan mendukung penyediaan dokumen administratif dan sosial yang berkaitan dengan riwayat penguasaan lahan dan masyarakat sekitar lokasi.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Teknis Terpadu antara BP3OKP, DLHKP, ATR/BPN, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk menindaklanjuti proses penerbitan sertifikat lahan secara terpadu dan sesuai ketentuan. 2. Melakukan penegasan batas kawasan melalui survei lapangan dan validasi data spasial bersama Kementerian LHK sebelum proses sertifikasi dilanjutkan. 3. Menempuh mekanisme legal formal berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau revisi RTRW apabila lokasi bandara tetap berada di dalam kawasan lindung. 4. Melakukan kajian AMDAL tambahan untuk memastikan bahwa dampak ekologis dari penggunaan kawasan

	<p>lindung dapat dimitigasi serta diimbangi melalui program rehabilitasi kawasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam proses sertifikasi agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum kehutanan dan lingkungan. 6. Melaksanakan koordinasi berkala lintas kementerian (KLHK, ATR/BPN, Kemenhub, BP3OKP) melalui forum koordinasi triwulanan guna memantau progres penyelesaian administrasi dan legalitas lahan. 7. Menetapkan mekanisme pelaporan yang transparan agar seluruh proses sertifikasi dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan sesuai asas good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
Dokumentasi	

7) Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya
---------------	--

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	10 September 2025 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan audiensi terkait Program Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya mengenai koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta membahas isu-isu lain yang berkaitan dengan keamanan dan kondisi sosial di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang kerja Wakil Gubernur ini juga dimaksudkan untuk melaporkan berbagai kegiatan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) yang telah dilakukan oleh BP3OKP Papua Barat Daya dalam rangka percepatan pembangunan daerah, terutama terkait pelaksanaan program Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Wakil Gubernur PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP & RIPPP (Papua Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan dilakukan komunikasi secara intens antara BP3OKP dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program. 2. Koordinasi antar bupati dan wali kota se-Provinsi Papua Barat Daya dapat berjalan efektif apabila terdapat instruksi langsung (direct order) dari pimpinan daerah. 3. Saat ini belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memandu kerja Satgas MBG. 4. Belum ada langkah konkret dari OPD terkait untuk melakukan persiapan dalam mendukung ketahanan pangan. 5. Belum terdapat langkah antisipatif guna mencegah potensi inflasi akibat meningkatnya permintaan bahan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pelaksanaan PSN Makan Bergizi Gratis, termasuk pembentukan Satgas dan kesiapan pangan daerah.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Saran dan masukan BP3OKP sejalan dengan rencana Pemerintah Daerah, sehingga akan ditindaklanjuti secara sinergis. 3. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Papua Barat Daya agar diterbitkan Surat Edaran tentang pembentukan Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota. 4. Menyusun dan menetapkan SOP untuk memandu pelaksanaan tugas Satgas MBG. 5. Melakukan koordinasi teknis lintas sektor dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. 6. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Papua (UNIPA), untuk memperkuat program KKN Tematik di bidang peternakan, perikanan, dan pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan mencegah inflasi.
Dokumentasi	

8) Kegiatan 8

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	10 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan peran legislatif, khususnya DPR Papua (DPRP) jalur pengangkatan Otsus, dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Provinsi

	Papua Barat Daya. Selain itu, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mencari solusi agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak kembali menjadi besar, mengingat keterlambatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) (akibat dari penyampaian syarat salur yang tidak tepat waktu) yang berdampak pada serapan anggaran di daerah.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya (Komigi)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP
Hasil Kegiatan	<p>Dari BPP Papua Barat Daya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPP menjelaskan fungsi dan perannya kepada DPRP agar terdapat pemahaman yang sama, bahwa BPP merupakan lembaga teknis yang memiliki tugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran, termasuk dana Otsus, bantuan UMKM, maupun dana transfer ke daerah lainnya. 2. BPP menekankan pentingnya pengawasan agar dana tidak mengendap menjadi SILPA, melainkan terserap efektif sesuai program dan sasaran manfaatnya. 3. Kementerian Keuangan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus tahun 2024, untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai ke masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), bukan berhenti di tingkat birokrasi. 4. BPP Papua Barat Daya akan menyiapkan format evaluasi dana Otsus yang diselaraskan dengan format dari Kanwil DJPb, dan akan digunakan bersama MRP dan DPRP dalam pelaksanaan evaluasi bersama. <p>Dari Anggota DPRP (Bapak Mathias Komigi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPRP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur

	<p>benar-benar sesuai dengan realisasi anggaran dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam konteks evaluasi dana Otsus di Papua Barat Daya, DPRP mendorong agar BPP melakukan evaluasi berdasarkan LPJ Gubernur dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan dampak program, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi OAP.</p> <p>2. Beberapa penyebab utama terjadinya SILPA yang diidentifikasi dalam rapat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan lain-lain yang sah (termasuk bunga bank); Dana talangan proyek dari pihak ketiga (misalnya PT Pulmon) sementara dana resmi turun di akhir tahun, menyebabkan dana mengendap; Skema proyek yang tidak bersifat multi-year sehingga tidak dapat dilanjutkan di tahun berikutnya; Dana pemberdayaan UMKM yang ditempatkan di bank dan menghasilkan bunga sekitar Rp3 miliar, sehingga dana tersebut tidak dimanfaatkan langsung oleh mama-mama OAP sebagai penerima manfaat utama.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> BPP perlu terus memperkuat perannya dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana Otsus, UMKM, dan TKD agar tidak mengendap menjadi SILPA. DPRP memiliki tanggung jawab untuk mengawal LPJ Gubernur dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta dampak nyata program terhadap masyarakat, khususnya OAP. SILPA yang tinggi disebabkan oleh faktor teknis seperti keterlambatan TKD, proyek yang tidak multi-year, dana talangan, dan penempatan dana UMKM di bank; hal ini perlu ditangani dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi lintas sektor.

	4. Disepakati bahwa evaluasi dana Otsus tahun 2024 harus dilakukan secara lebih ketat, kolaboratif, dan berbasis hasil nyata di lapangan, dengan melibatkan BPP, DPRP, MRP, dan Kementerian Keuangan.
Dokumentasi	

9) Kegiatan 9

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	11 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Untuk menindaklanjuti permohonan audiensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka membangun koordinasi dan komunikasi terkait pelaksanaan program pembangunan di wilayah Sorong Selatan yang selaras dengan arah kebijakan RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Pemda Kabupaten Sorong Selatan (Setda)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP & RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Disepakati pentingnya memperkuat sinergi antara Pemda Sorong Selatan dan BPP dalam perencanaan serta pelaksanaan program prioritas yang berorientasi pada

	peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang mengacu pada RIPPP.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Akan dilakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan hasil koordinasi untuk memastikan keselarasan dengan visi RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif).
Dokumentasi	

10) Kegiatan 10

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	11 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Untuk membangun sinergi dan meluruskan persepsi antara BPP Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPP, serta memperkuat koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Ketua MRP PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP
Hasil Kegiatan	1. MRP menyampaikan maksud kedatangan untuk membangun hubungan kerja yang lebih terbuka dengan BPP serta memperoleh kejelasan mengenai ruang lingkup kerja dan hasil kinerja BPP.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. BPP memberikan penjelasan terkait peran, fungsi, serta capaian kerja dalam pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya. 3. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan, khususnya dalam evaluasi pelaksanaan Dana Otonomi Khusus tahun 2024.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPP akan menyiapkan laporan evaluasi Dana Otsus 2024 sebagai bahan pembahasan bersama MRP. 2. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan antara BPP dan MRP guna menyelaraskan hasil evaluasi serta merumuskan langkah strategis bersama. 3. Sinergi BPP dan MRP akan terus diperkuat melalui forum-forum koordinasi dan konsultasi kebijakan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua Barat Daya.
Dokumentasi	



11) Kegiatan 11

Nama Kegiatan	Rapat Internal BPP Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	15 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Untuk membahas rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Papua Barat Daya pada bulan September 2025, termasuk pembahasan strategis mengenai pengelolaan dan penertiban aset daerah yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota, Pokja, PPNPN)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi sejumlah kegiatan prioritas yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang dalam bulan September 2025. 2. Dibahas langkah-langkah koordinatif antara BPP dengan pemerintah daerah dan K/L.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun jadwal koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tindak lanjut pengelolaan aset daerah berjalan sesuai ketentuan. 2. Melaksanakan rapat pemantauan lanjutan guna mengevaluasi hasil tindak lanjut dan mengidentifikasi kendala lapangan secara berkala.

Dokumentasi



12) Kegiatan 12

Nama Kegiatan	Rapat Paripurna DPR Papua Barat Daya Masa Sidang III Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	15 September 2025 di Vega Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan Rapat Paripurna DPR Papua Barat Daya Masa Sidang III Tahun 2025
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Forkopimda PBD; Anggota DPRD PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-
Dokumentasi	



13) Kegiatan 13


Nama Kegiatan	Audiensi dengan Kepala BIN Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	15 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta layanan kesehatan lainnya, guna memastikan keterpaduan antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam mendukung peningkatan gizi dan kesejahteraan anak sekolah di Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Kepala BIN PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP & RIPP (Papua Sehat & Produktif)
Hasil Kegiatan	Tercapai kesepakatan antarinstansi mengenai target, indikator, dan capaian bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk aspek pemantauan status gizi peserta didik dan dukungan fasilitas kesehatan di sekolah.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Melaksanakan evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait efektivitas koordinasi lintas sektor dan hasil pemantauan gizi anak di daerah pelaksanaan program.



14) Kegiatan 14

Nama Kegiatan	Bursa Kerja (Job Fair) 2025 Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	16-17 September 2025 di BPVP Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Kehadiran BPP Papua Barat Daya dalam kegiatan Bursa Kerja (Job Fair) 2025 merupakan tindak lanjut dari undangan Pemerintah Daerah sekaligus pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) di bidang ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyediaan lapangan kerja, serta memastikan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus mendukung peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Usulan Pokja Produktif); Pemda PBD; BPVP Sorong; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Job Fair Papua Barat Daya 2025 menjadi langkah nyata Pemerintah Daerah dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan, terutama tingginya angka pengangguran terbuka (6,61%) yang melebihi rata-rata nasional. 2. Kegiatan ini berhasil menghadirkan 17 perusahaan dengan total 1.062 lowongan kerja, meskipun sebagian

	<p>besar di sektor perkebunan sawit yang kurang diminati oleh pencari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Semangat Otonomi Khusus (Otsus) ditegaskan melalui prioritas perekrutan bagi Orang Asli Papua (OAP), disertai komitmen pembinaan dan pelatihan berkelanjutan. 4. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses OAP terhadap pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus serta kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lowongan. 5. Job Fair tidak hanya berfungsi sebagai ajang perekrutan tenaga kerja, tetapi juga sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan dalam membangun sumber daya manusia Papua Barat Daya yang berdaya saing.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan program pelatihan vokasi dan sertifikasi (seperti operator alat berat, mekanik, elektrikal, pelaut, dan bidang lainnya). • Menyediakan peralatan usaha untuk mendukung kemandirian masyarakat pasca-pelatihan. • Menyelenggarakan Job Fair secara berkala (2–3 kali per tahun) dengan memperluas sektor dan jumlah perusahaan peserta. • Memperkuat koordinasi dengan dunia usaha untuk membuka lebih banyak peluang kerja formal bagi OAP. 2. Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan rekrutmen OAP sesuai kompetensi. • Menyediakan program pembinaan, magang, dan pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. • Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong peningkatan kapasitas SDM Papua.

	<p>3. Pencari Kerja (khususnya OAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, vokasi, dan sertifikasi. • Menyusun CV yang baik, menjaga etika kerja, dan mempersiapkan diri untuk bersaing di pasar kerja. • Memanfaatkan peluang kerja tidak hanya di sektor formal, tetapi juga di bidang wirausaha dan ekonomi kreatif.
Dokumentasi	

15) Kegiatan 15

Nama Kegiatan	Audiensi bersama Wakil Presiden Republik Indonesia
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	17 September 2025 di Gedung Keuangan Negara Jayapura
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Audiensi dilaksanakan dalam rangka mendengarkan arahan langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua BPP kepada para anggota Badan Pengarah Papua (BP3OKP) dari enam provinsi di Tanah Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Tanah Papua, menyampaikan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), serta membahas berbagai isu strategis terkait kelembagaan, pelaksanaan percepatan pembangunan, pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP.

Peserta Kegiatan	Ketua BPP (Wapres); 6 Anggota BPP Perwakilan Seluruh Provinsi di Wilayah Papua; Sekretariat BPP Jayapura & Manokwari; Kanwil DJPb dan GKN Papua
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	BPP & RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif & Kondisi Pelu-Pengarusutamaan)
Hasil Kegiatan	<p>Paparan Anggota BP3OKP dari Enam Provinsi Papua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan misi Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai, serta kebutuhan penguatan kelembagaan melalui penetapan Sekretaris Eksekutif, pengisian Pokja, dan percepatan penetapan RAPPP 2024–2029. 2. Disampaikan pula tantangan yang dihadapi, antara lain keterlambatan penyaluran TKD, keterbatasan sarana-prasarana, serta kebutuhan dukungan lintas kementerian dalam mendukung fungsi pokja di daerah. 3. Anggota BP3OKP menekankan pentingnya koordinasi dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas daerah, serta perbaikan tata kelola dana Otsus agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). <p>Arahan Wakil Presiden RI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapresiasi kinerja dan komitmen para anggota BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua. 2. Menyampaikan bahwa pengangkatan Sekretaris Eksekutif, penetapan Pokja, dan pengesahan RAPPP masih dalam proses finalisasi dan menunggu arahan Presiden. 3. Menegaskan pentingnya fokus pembangunan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan stunting, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengendalian inflasi daerah.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menyoroti pentingnya pencegahan korupsi, percepatan realisasi belanja daerah, serta pendampingan oleh lembaga pengawasan seperti BPK, BPKP, APIP, dan KPK. 5. Mengingatkan agar pendekatan pembangunan di Papua tidak hanya bersifat fisik dan keamanan, melainkan lebih menekankan pendekatan sosial dan kesejahteraan. 6. Menyampaikan harapan agar BP3OKP dan pemerintah daerah tetap bersinergi mendukung program Presiden, dengan semangat Indonesia-sentris yang menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas pembangunan nasional.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<p>Kelembagaan</p> <p>Mendorong percepatan penetapan Sekretaris Eksekutif BP3OKP, pengisian Pokja-Pokja, dan pengesahan RAPP 2024–2029 untuk memperkuat kinerja kelembagaan.</p> <p>Koordinasi Pusat-Daerah</p> <p>Memperkuat komunikasi antara pusat dan perwakilan provinsi (BPP) guna memastikan pelaksanaan misi pembangunan berjalan sinkron dengan prioritas nasional.</p> <p>Peningkatan Akuntabilitas dan Efektivitas Dana Otsus</p> <p>Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana Otsus dan TKD agar lebih cepat tersalurkan serta tepat sasaran bagi peningkatan kesejahteraan OAP.</p> <p>Fokus Pembangunan Sektoral</p> <p>Mengutamakan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif dalam rangka peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja lokal (RIPPP).</p> <p>Sinergi Program dan Pengawasan</p> <p>Mengintegrasikan program BP3OKP dengan kementerian/lembaga terkait serta memperkuat pendampingan dari lembaga pengawasan (BPK, BPKP, KPK) agar pembangunan bebas dari praktik korupsi.</p>

	Pendekatan Pembangunan Humanis Mendorong implementasi pembangunan berbasis pendekatan sosial dan kesejahteraan, menghindari pendekatan yang menimbulkan ketegangan sosial atau kesenjangan antarwilayah.
Dokumentasi	 

16) Kegiatan 16

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Wakil Walikota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	17 September 2025 di Kantor Walikota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melakukan koordinasi terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Kota yang saat ini belum termanfaatkan.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja); Wakil Walikota Sorong dan Team

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Kondisi Perlu)
Hasil Kegiatan	Pemerintah Kota Sorong menyatakan kesediaannya untuk menyiapkan dukungan aset dalam rangka rencana investasi di wilayah Kota Sorong.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Melaksanakan proses serah terima aset secara lengkap antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kota Sorong dan/ atau forum SHEK : koordinasi aset daerah.
Dokumentasi	 

17) Kegiatan 17

Nama Kegiatan	Audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	22 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan fungsi koordinasi dalam rangka persiapan tahapan Running On Program Diploma Daerah – Akademi Komunitas (PDD-AK) Kabupaten Sorong Selatan.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja Cerdas); Tim Dinas Pendidikan & Kebudayaan PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Cerdas)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP3OKP diminta untuk memberikan dukungan dan arahan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya sebagai OPD teknis yang membidangi Akademi Komunitas. 2. BP3OKP membangun koordinasi dengan Universitas Papua (UNIPA) dan Kemendikbudristek Saintek sebagai bentuk komitmen pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi. 3. OPD teknis merencanakan pelaksanaan FGD terkait pendirian atau pengaktifan kembali PDD-AK Akness Kabupaten Sorong Selatan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari resume hasil FGD Pendirian Akademi Komunitas tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya. 2. Melaksanakan diskusi teknis bersama Bidang Akademi Komunitas dan/atau Bidang Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya. 3. Menjalin koordinasi dengan UNIPA dan Kemendikbudristek Saintek sebagai bentuk pendampingan kepada OPD teknis.
Dokumentasi	



18) Kegiatan 18


Nama Kegiatan	Audiensi dengan Tim Sekolah Sepanjang Hari (SSH) Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	22 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi capaian, tantangan, dan kebutuhan teknis dalam pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di Kabupaten Maybrat. 2. Membangun sinergi kelembagaan antara BP3OKP Papua Barat Daya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta Tim SSH Kabupaten Maybrat. 3. Menyusun langkah koordinatif untuk memperluas cakupan SSH sebagai model pendidikan inklusif dan gizi terpadu. 4. Mendorong integrasi SSH dengan program nasional dan daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat Papua Cerdas. 5. Menetapkan rencana aksi bersama dalam mendukung misi Papua Cerdas, Sehat, dan Produktif di tingkat kabupaten.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja Produktif); Tim SSH Kabupaten Maybrat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Cerdas)

<p>Hasil Kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapai kesepakatan bahwa SSH merupakan model pendidikan kontekstual yang efektif dalam membentuk generasi Papua yang cerdas, sehat, dan berkarakter. 2. BP3OKP Papua Barat Daya dan Tim SSH Kabupaten Maybrat sepakat memperkuat kelembagaan SSH sebagai program prioritas daerah yang didukung melalui Dana Otsus dan APBD sektor pendidikan. 3. Disepakati pentingnya integrasi SSH dengan program MBG dan Sekolah Rakyat Papua Cerdas guna memastikan keterpaduan aspek akademik, gizi, dan pembinaan karakter. 4. Diperoleh komitmen bersama untuk memperluas implementasi SSH ke distrik lain, antara lain Aifat Raya, Aitinyo, dan Ayamaru Barat pada tahun pelajaran berikutnya. 5. UNIPA dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat akan menyusun indikator evaluasi SSH yang mencakup perkembangan fisik, kemampuan literasi-numerasi, serta status gizi siswa.
<p>Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Koordinasi Teknis SSH-MBG Kabupaten Maybrat yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BP3OKP, dan UNIPA untuk mengawal implementasi di lapangan. 2. Melaksanakan pelatihan bagi guru dan tenaga pendamping SSH, khususnya dalam aspek manajemen waktu belajar, pengawasan gizi, dan pembinaan karakter. 3. Mengalokasikan dukungan anggaran dari Dana Otsus dan APBD Kabupaten Maybrat untuk penguatan sarana makan bergizi, penyediaan air bersih, dan dapur sekolah. 4. Melakukan pemetaan data dasar (baseline) capaian literasi, numerasi, dan gizi siswa sebagai dasar evaluasi tahunan. 5. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara triwulanan dengan melibatkan BP3OKP, Dinas

	<p>Pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan Laporan Tematik SSH Maybrat 2025 sebagai model praktik baik (best practice) pendidikan kontekstual di Tanah Papua. Mengusulkan SSH Maybrat sebagai program unggulan Papua Cerdas tingkat provinsi yang dapat direplikasi di kabupaten lain di wilayah Papua Barat Daya.
Dokumentasi	 

19) Kegiatan 19

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Sekretariat BPP untuk Wilayah Provinsi Papua Barat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	22 September 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan koordinasi mengenai dukungan administratif dan substantif oleh Kanwil DJPb Papua Barat.


	Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh arahan terkait tugas, fungsi, dan kewenangan atas pengalihan urusan dari Kanwil DJPb Papua Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas substantif dan administratif BPP Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Tim Kanwil DJPb Papua Barat/Sekretariat BPP Manokwari; KPPN Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP & RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan substantif dan administratif telah secara resmi dialihkan dan menjadi tanggung jawab Kanwil DJPb Papua Barat. 2. Diperoleh arahan agar format Evaluasi Laporan Otsus yang telah disusun dapat segera diselesaikan, dan hasilnya akan dikoordinasikan secara menyeluruh dengan BPP provinsi lainnya. 3. Direncanakan pertemuan lanjutan bersama untuk menyamakan arah kebijakan dan memperkuat sistem dukungan (support system) yang menunjang urusan substantif maupun administratif.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pertemuan lanjutan bersama Kanwil DJPb Papua Barat guna menindaklanjuti format Evaluasi Laporan Otsus Tahun 2024. 2. Memperkuat koordinasi terkait pengembangan sistem pendukung (support system) yang menunjang pelaksanaan tugas substantif dan administratif BPP Papua Barat Daya.
Dokumentasi	



20) Kegiatan 20

Nama Kegiatan	Press Conference Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	23 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menjelaskan tugas dan fungsi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) kepada masyarakat, serta menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia kepada BP3OKP terkait percepatan pembangunan Papua yang berlandaskan empat misi utama: Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Polhukam/Damai.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Wartawan (Tribun Sorong, Metro TV, Papua Viral Sedunia, Melanesia)
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP
Hasil Kegiatan	Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 121

	<p>Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 (RIPPP), dengan Wakil Presiden RI sebagai Ketua dan dukungan lintas kementerian serta BPP.</p> <p>Fokus utama pembangunan diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan infrastruktur strategis, serta penguatan mekanisme evaluasi Dana Otsus agar program benar-benar menyentuh kebutuhan Orang Asli Papua (OAP).</p> <p>Pengawasan pelaksanaan dilakukan bersama lembaga negara (BPKP, BPK, KPK), pemerintah daerah, DPR, MRP, dan akademisi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>Arahan Wakil Presiden menekankan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan RIPPP, intervensi lintas sektor untuk penanganan stunting, serta prioritas pembangunan infrastruktur yang memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Diharapkan pembangunan di Papua Barat Daya dapat berlangsung lebih tepat sasaran, ramah lingkungan, berbasis kearifan lokal, serta menghindari kesalahan implementasi Otsus sebelumnya, sehingga manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat OAP.</p>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Isu Stunting di Kabupaten Mamberamo: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan intervensi lintas sektor mencakup aspek gizi, sanitasi, air bersih, serta layanan kesehatan ibu dan anak. • Menetapkan target penurunan prevalensi stunting dalam kurun waktu dua tahun. • Melibatkan Pemda, Dinas Kesehatan, dan lembaga mitra terkait. 2. BPP se-Tanah Papua segera mengusulkan lokasi atau daerah yang akan menjadi tujuan kunjungan Wakil Presiden berikutnya di wilayah Papua.


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengawal pelaksanaan launching SIPPP dan RAPP agar dapat dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Rumah Sakit Vertikal oleh Presiden RI. 4. BPP Papua Barat Daya melalui Pokja Papua Produktif menyiapkan rapat koordinasi antara Bupati Kabupaten Sorong dan Gubernur Papua Barat Daya terkait penyelesaian akses jalan menuju lokasi wisata Malasigi, Klayili (Kabupaten Sorong), yang selanjutnya akan ditinjau langsung oleh Gubernur bersama BPP.
Dokumentasi	

21) Kegiatan 21

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Otsus BPP
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	23-24 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi terkait pengembangan alat ukur untuk evaluasi kinerja pelaksanaan Otonomi Khusus. 2. Melakukan sinkronisasi format yang dikembangkan oleh Pokja Papua Barat Daya bersama tim dukungan substantif Kanwil DJPb Papua Barat, guna meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun policy brief yang baik, benar, dan mudah dipahami oleh pengambil kebijakan (policy maker), serta memberikan panduan penyusunan policy brief berbasis data dan analisis yang akurat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja); Tim Kanwil DJPb Papua Barat/Sekretariat BPP Manokwari;

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP & RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim dukungan substantif akan mengembangkan alat ukur penilaian kinerja Otonomi Khusus yang disusun oleh Pokja Papua Barat Daya. 2. Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan untuk membahas pengembangan alat ukur tersebut. 3. Peningkatan Kapasitas Penulisan Policy Brief Lokakarya berhasil meningkatkan pemahaman peserta dalam penyusunan policy brief yang efektif, berbasis data, serta mudah diterima oleh pengambil kebijakan. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based) menjadi dasar utama agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil. 4. Peran Strategis Analisis Kebijakan (JFAK) JFAK berperan sebagai knowledge broker yang menjembatani data dan keputusan kebijakan. Tantangan utama meliputi keterbatasan SDM, ketidaksesuaian penempatan jabatan, serta minimnya pemahaman pimpinan terhadap fungsi JFAK. Diperlukan langkah penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi. 5. Konteks Papua Barat Daya dan Papua Barat Kedua provinsi menghadapi tantangan pembangunan lintas sektor seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, dan tata kelola Otsus. Keterbatasan data sektoral dan kapasitas analisis menjadi hambatan dalam perencanaan berbasis bukti. Kota Sorong menjadi contoh praktik baik dengan capaian inovasi tinggi. 6. Kolaborasi Multipihak dalam Community of Practice & Influence (CoPI) Pembentukan jejaring CoPI menjadi wadah pembelajaran lintas instansi untuk memperkuat kapasitas analisis kebijakan daerah. SKALA, BSKDN,

	<p>LAN, dan pemerintah daerah berperan penting dalam fasilitasi dan keberlanjutannya.</p> <p>7. Kebutuhan Penguatan Tata Kelola dan Integrasi Data</p> <p>Data konvensional (BPS, statistik resmi) perlu dilengkapi dengan data non-konvensional (geospasial, layanan publik, komunitas) guna mendukung analisis yang lebih kontekstual dan responsif. Isu bias data dan visualisasi menjadi perhatian penting agar rekomendasi kebijakan lebih akurat dan komunikatif.</p>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<p>1. Penguatan Kapasitas dan Komunitas Analisis Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan mengaktifkan Community of Practice (CoPI) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. • Melaksanakan pelatihan lanjutan terkait policy brief, analisis data, dan komunikasi kebijakan berbasis kasus daerah. • Mengusulkan penerbitan SK Kepala Bappeda untuk mendukung kelembagaan CoPI serta alokasi anggaran kegiatan. <p>2. Integrasi Data dan Penguatan Sistem Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem satu data daerah (Forum Satu Data) yang memadukan data konvensional dan non-konvensional. • Mendorong pemanfaatan dashboard integratif (misalnya SIPPP) untuk mendukung analisis dan pemantauan kebijakan Otsus serta layanan dasar. <p>3. Peningkatan Kualitas Produk Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengarahkan setiap OPD agar menghasilkan policy brief tematik (kemiskinan, stunting, ekonomi biru, GEDSI, dan Otsus). • Mengintegrasikan hasil policy brief ke dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai dasar perencanaan berbasis bukti. <p>4. Kolaborasi dan Advokasi Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, media, lembaga penelitian, dan organisasi

	<p>masyarakat sipil untuk memperkuat advokasi kebijakan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan Australia Embassy, SKALA, dan LAN dalam pendampingan teknis serta pertukaran pengetahuan lintas daerah. <p>5. Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan indikator keberhasilan seperti jumlah policy brief yang dimanfaatkan dalam perencanaan, jumlah anggota CoPI aktif, dan peningkatan indeks inovasi daerah. • Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan serta penerapan hasil lokakarya dalam kebijakan nyata.
Dokumentasi	

22) Kegiatan 22

Nama Kegiatan	Workshop Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) untuk Akselerasi Layanan Dasar Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	24-25 September 2025 di Gedung Pemprov Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas anggota Pokja Sehat sebagai analis kebijakan. 2. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan sintesis serta analisis terhadap program dan kebijakan.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); SKALA; Pemda/OPD Teknis PBD; Tamu undangan lainnya

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP & RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Meningkatnya kemampuan anggota Pokja Sehat dalam melakukan analisis kebijakan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Penyusunan Policy Brief oleh anggota Pokja Sehat sebagai tindak lanjut peningkatan kapasitas analisis kebijakan.
Dokumentasi	  

23) Kegiatan 23

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Kepala Subdit Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Kementerian Keuangan (Bapak Ardimansyah)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	25 September 2025 di Hotel Royal Mamberamo
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun 2026. 2. Melakukan koordinasi terkait pendampingan pelaksanaan asistensi penyusunan Rencana Anggaran Program (RAP) Otonomi Khusus tahun 2026.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Bapak Ardimansyah & Tim
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP & RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan dilaksanakan pendampingan bagi daerah dalam penyusunan RAP Otonomi Khusus tahun 2026. 2. BP3OKP mengusulkan agar pendampingan dilakukan melalui sistem On the Job Training (OJT).
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Menyampaikan kebutuhan asistensi secara tertulis kepada pihak terkait.
Dokumentasi	




24) Kegiatan 24

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	25 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Membangun sinergi antara BP3OKP Papua Barat Daya dan Ombudsman dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja Cerdas); Tim Ombudsman PB
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP & RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	Terjalinnya sinergitas BPP dengan Ombudsman
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	-
Dokumentasi	



25) Kegiatan 25

Nama Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	26 September 2025 di SD YPK Elim Malanu; SMP YPK Shaloom Klademak III
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan uji petik untuk menilai peran dan tata kelola Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab penyelenggaraan layanan pendidikan serta hubungan kelembagaan antara yayasan dan pemerintah daerah.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Pihak Sekolah SD YPK Elim Malanu & SMP YPK Shaloom Klademak III
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Cerdas)
Hasil Kegiatan	1. Berdasarkan hasil uji petik terhadap aspek 1–3, ditemukan bahwa sebagian besar respon menunjukkan

	<p>jawaban “Tidak”, yang berarti YPK tidak berperan aktif secara terstruktur dalam tata kelola dan tanggung jawab terhadap satuan pendidikan yang dikunjungi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil ini juga konsisten dengan temuan pada pertanyaan terbuka, yang memperlihatkan bahwa peran YPK sangat minim bahkan nyaris tidak ada, karena seluruh urusan layanan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD teknis terkait. Laporan hasil analisis secara detail akan disampaikan secara terpisah, namun tetap menjadi satu kesatuan dengan laporan kegiatan ini sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap peran YPK di daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi lengkap atas pelaksanaan uji petik kepada pimpinan BP3OKP Papua Barat Daya. Melaksanakan Forum SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) bersama Pengurus Sinode Wilayah (PSW) YPK Provinsi Papua Barat Daya untuk membahas hasil evaluasi dan menyusun langkah perbaikan tata kelola kelembagaan YPK ke depan.
Dokumentasi	

26) Kegiatan 26

Nama Kegiatan	Evaluasi Transformasi Peserta Program Khusus RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Jenjang JPT Pratama Kementerian PPN/Bappenas
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	26 September 2025 di Sekretariat BPP Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Memberikan penilaian dan umpan balik atas capaian kompetensi peserta melalui proses uji kelayakan dan transformasi pembelajaran.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Tim Penguji; Tim LAN; Bappenas/Direktur PIT
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	BPP & RIPPP (Papua Sehat, Cerdas, Produktif)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota BPP Papua Barat Daya berperan sebagai tim penguji dalam kegiatan evaluasi RPL. 2. Kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara Kementerian PPN/Bappenas dan BP3OKP Papua Barat Daya dalam mendukung agenda percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi di Tanah Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	-
Dokumentasi	



27) Kegiatan 27

Nama Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Pulau Soop
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	27 September 2025 di SD YPK Efata Soop Distrik Sorong Kepulauan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan uji petik terhadap peran dan tata kelola Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Provinsi Papua Barat Daya untuk menilai efektivitas, tanggung jawab, serta kontribusi yayasan dalam pengelolaan satuan pendidikan di bawah naungannya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Pihak Sekolah SD YPK Efata Soop Distrik Sorong Kepulauan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Cerdas)
Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil uji petik terhadap tiga aspek yang dievaluasi, diperoleh hasil negatif, yang menunjukkan bahwa Yayasan tidak berperan aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab dan tata kelola satuan pendidikan. Sejumlah sekolah bahkan menyampaikan bahwa berbagai kendala seperti kepemilikan tanah, pembayaran honor guru kontrak, hingga pembangunan ruang belajar (rombel) diselesaikan secara mandiri tanpa dukungan yayasan. 2. Seluruh operasional dan tanggung jawab yang semestinya menjadi kewenangan yayasan telah

	<p>sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong.</p> <p>3. Jawaban atas pertanyaan terbuka menunjukkan adanya saran dan masukan dari satuan pendidikan agar yayasan dapat berperan lebih aktif dan profesional. Terdapat korelasi positif antara satuan pendidikan yang telah memahami peran yayasan dengan penyampaian harapan peningkatan peran tersebut.</p> <p>4. Laporan analisis secara rinci akan disusun dan disampaikan secara terpisah, namun menjadi satu kesatuan dengan laporan kegiatan ini.</p>
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Pelaksanaan Forum Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) bersama Persekutuan Sekolah YPK di Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti hasil temuan dan memperkuat tata kelola yayasan secara kelembagaan.
Dokumentasi	

28) Kegiatan 28

Nama Kegiatan	SHEK terkait Status Tanah Bekas Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	30 September 2025 di Kantor BPN Kabupaten Sorong & Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memperoleh kejelasan status kepemilikan tanah bekas

	Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong serta memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai ketentuan.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); BPN Kabupaten Sorong & Kota Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Kondisi Perlu)
Hasil Kegiatan	Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya (BPP PBD) akan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong agar lebih proaktif menanyakan dan menyelesaikan status aset yang masih bermasalah kepada Kantor Pertanahan setempat.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Melaksanakan Forum Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait aset daerah, guna memperkuat koordinasi, mempercepat penyelesaian permasalahan aset, dan memastikan legalitas kepemilikan lahan pemerintah.
Dokumentasi	



2.2 Capaian

Selama bulan September 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan 28 kegiatan koordinatif, sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi (SHEK) di berbagai bidang yang berlandaskan empat misi utama Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Secara umum, capaian pelaksanaan tugas dan fungsi bulan ini menunjukkan:

1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Pusat–Daerah

- a) Terjalin koordinasi yang efektif antara BPP di daerah dengan Sekretariat BPP Pusat, Kanwil DJPb, dan Kementerian/Lembaga terkait.
- b) Audiensi bersama Wakil Presiden RI memperkuat arah kelembagaan BP3OKP, khususnya dalam percepatan pengesahan RAPPP 2025–2029 dan penetapan Sekretaris Eksekutif.
- c) BPP Papua Barat Daya aktif menjadi narasumber dan tim penguji dalam kegiatan nasional seperti Evaluasi RPL Bappenas, memperkuat posisi strategis lembaga dalam pembangunan berbasis kompetensi di Tanah Papua.

2. Konsolidasi Program Prioritas dan Layanan Dasar

- a) Pelaksanaan berbagai kegiatan Papua Cerdas dan Sehat seperti uji petik peran YPK, koordinasi program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta workshop penyusunan *policy brief* memperkuat pendekatan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based*).
- b) Hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan peran yayasan pendidikan serta sinkronisasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak dan penurunan stunting.

3. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Otsus

- a) BPP Papua Barat Daya bersama Kanwil DJPb Papua Barat mengembangkan alat ukur evaluasi kinerja Otonomi Khusus serta menyelaraskan format evaluasi laporan Otsus antarprovinsi (BPP).
- b) Dilakukan koordinasi dengan DPRP, MRP, dan Pemda untuk memastikan dana Otsus dan TKD terserap optimal dan tidak kembali menjadi SILPA tinggi.
- c) Muncul inisiatif pembentukan *Community of Practice (CoPI)* untuk memperkuat kapasitas analisis kebijakan di daerah.

4. Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Daerah dan Aset Pemerintah

- a) Melalui forum SHEK dan koordinasi lintas instansi, BPP berperan aktif dalam mempercepat penyelesaian masalah aset pemerintah (seperti status tanah bekas Gedung Pertemuan Kabupaten Sorong dan aset Pemkot Sorong).

- b) Didorong pembentukan forum terpadu lintas kementerian (ATR/BPN, DLHKP, Pemda) guna menjamin kepastian hukum aset daerah dan mendukung rencana investasi.

5. Penguatan Sinergi Sosial–Politik dan Ekonomi Daerah

- a) Kegiatan bersama DPRD, BIN, dan Ombudsman memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan publik, serta komunikasi kebijakan yang lebih inklusif.
- b) Pelaksanaan Job Fair Papua Barat Daya 2025 menjadi langkah konkret penguatan ekonomi produktif dan penyerapan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP).

6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Inovasi Kebijakan

- a) Melalui *Workshop Policy Brief* dan Rapat Teknis Evaluasi Otsus, anggota Pokja dan analis kebijakan memperoleh peningkatan kapasitas dalam analisis data, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan komunikasi publik yang efektif.
- b) Hasil pelatihan diharapkan menghasilkan produk kebijakan tematik berbasis data di bidang kemiskinan, stunting, dan ekonomi biru.

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK selama bulan September 2025 menunjukkan **kinerja BPP Papua Barat Daya yang progresif dan strategis**, dengan fokus pada:

1. Konsolidasi kelembagaan dan sinergi lintas sektor,
2. Penguatan tata kelola Otsus dan akuntabilitas daerah,
3. Peningkatan kualitas layanan dasar dan kapasitas kebijakan publik, serta
4. Penguatan fondasi sosial-ekonomi berbasis masyarakat adat.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan ini disusun dan disampaikan sebagai bentuk realisasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, yang diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan September 2025.

Diharapkan laporan ini dapat membawa manfaat bagi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja ke depannya, serta bermanfaat bagi Wakil Presiden RI selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP) dan Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dalam monitoring kegiatan BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.